BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interpendensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita &Yani, 2014 : 3-4).

Perkembangan di dalam politik luar negeri, dimana terdapat pola-pola yang salah satunya ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kemana arah suatu negara melangkah, apakah cenderung kepada kerjasama politik, ekonomi, sosial budaya atau kepada pertahanan dan keamanan. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Dougherty dan Pfaltzgraff, 2007 : 418).

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerjasama regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Sehingga integrasi ekonomi regional dan bahkan integrasi ekonomi global merupakan fenomena yang diterima sebagai bentuk kerjasama internasional bagi setiap negara. Kerjasama dalam konteks yang berbeda, namun kebanyakan interaksi kerja sama terjadi secara langsung di antara dua negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung kepentingan bersama. Kerjasama internasional terbentuk karena

kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2014 : 33).

Hubungan Internasional merupakan bagian penting dari isu konflik yang ada didunia internasional. Hal ini diakibatkan karena terdapat persaingan antar negara-negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Konflik dalam kajian Hubungan Internasioal merupakan salah satu isu yang sangat penting, karena Hubungan Internasioanal adalah ilmu yang mempelajari bentuk interaksi antar aktor atau anggota masyarakat. Dalam kajian Hubungan Internasonal, konflik tidak hanya terjadi antar individu saja, akan tetapi konflik dapat terjadi pada aktor antar negara yang memiliki kepentingan didalamnya.Menurut Stefan Wolff, konflik sebagai fenomena sosial dari persaingan antar aktor dengan tujuan yang tidak kompatibel (Wolff, 2006 : 55).

Dampak adanya konflik antar negara ini adalah pemutusan hubungan antar negara atau yang lebih dikenal dengan pemutusan hubungan diplomatik antar negara. Hal ini adalah dampak terburuk dalam konflik antar negara karena dapat menghambat terhadap pemenuhan kepentingan nasional bagi negara yang terlibat konflik. Pemutusan hubungan diplomatik antar negara itu salah satunya yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar. Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar tepatnya pada tanggal 5 Juni 2017 lalu. Pemutusan hubungan diplomatik ini diikuti oleh beberapa negara tetangga yaitu Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir, kemudian tidak lama Maladewa dan Libia juga mengikuti jejak negara tetangganya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Ketegangan politik antara Qatar dengan Arab Saudi dan UEA sudah berlangsung sejak tahun 1970-an, dengan konflik-konflik yang pada awalnya berputar sebagian besar di sekitar sengketa perbatasan. Saat ini konflik antara Arab Saudi dan UEA dengan Qatar adalah mengenai kebijakan luar negeri Qatar yang memancing kemarahan kedua tetangganya. Terutama sejak munculnya *Arab Springs* yang disebut pada akhir tahun 2010, Qatar telah

memposisikan negaranya di belakang berbagai aktor dan aliansi regional yang berbeda dari Arab Saudi, khususnya kelompok islam Ikhwanul Muslimin yang semakin meningkat dan kelompok-kelompok yang dekat dengannya. Arab Saudi menganggap para aktor ini sebagai risiko keamanan bagi kawasan. Qatar juga memperluas hubungan dengan negara tetangganya, Iran. Ini tidak dapat diterima khususnya bagi Arab Saudi, yang merasa terancam oleh kebijakan regional Iran (Sailer, 2017 : 1).

Konflik antara Arab Saudi dan Qatar saat ini adalah konflik lama yang kembali mekar. Pada tahun 1995 konflik antara Arab Saudi dengan Qatar dimulai dengan ditandai naiknya Hamad bin Khalifa Al Thani sebagai Emir Qatar yang mengkudeta posisi emir sebelumnya yang dikenal dekat dengan Arab Saudi. Hamad bin Khalifa Al Thani ayah emir Qatar saat ini, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pada saat bersamaan, negeri kecil di ujung sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab ini melakukan pengiriman perdana gas alam cair dari reservoir atau cadangan terbesar di dunia di lepas pantai North Field yang luasnya setara dengan wilayah Qatar (https://geotimes.co.id/kolom/internasional/di-balik-perseteruan-qatar-versus-arab-saudi/ diakses pada 15 Mei 2018).

Qatar berbagi pengelolaan ladang minyak North Field dengan Iran, Negara yang notabene memiliki konflik yang sudah mengakar dengan Arab Saudi. Cadangan gas alam dalam jumlah besar itu tak hanya mengubah Qatar menjadi salah satu negara terkaya di dunia, dengan pendapatan per kapita tahunan mencapai US$ 130 ribu, tapi juga menjadi eksportir gas alam cair terbesar di dunia. Fokus Qatar pada pengelolaan gas, membuat negara itu berjarak dengan para tetangganya di *Gulf Cooperation Council* yang menyandarkan perekonomiannya pada minyak bumi sekaligus menjauhkannya darindominasinArabnSaudin(https://internasional.kompas.com/read/2017/08/24/19554241/qatar-perkuat-hubungan-dengan-iran-musuh-utama-arab-saudi diakses pada 15 Mei 2018).

Qatar tidak ada ketertarikan untuk membangun kerjasama dengan Arab Saudi, melainkan Qatar menjalin hubungan dengan Iran, Amerika Serikat, dan baru-baru ini Rusia. Salah satu pangkalan militer AS di wilayah teluk terletak di Qatar. Sementara itu, Badan Investasi Pemerintah Qatar setuju untuk menginvestasikan dana sebesar US$ 2,7 miliar ke perusahaan Rusia, Rosneft Oil Co. PJSC. Hal tersebut membuat Arab Saudi merasa terancam dengan aktifitas yang dilakukan oleh Qatar dan Iran. Salah satu upaya yang pernah dilakukan Arab Saudi pada 1996 yaitu dalam bentuk kudeta terhadap emir Qatar saat itu, Hamad bin Khalifa Al Thani, namun upaya tersebut gagal. Dalam persidangan tahun 2000, dua pejabat senior Qatar yang diduga terlibat dalam penggulingan emir Qatar mengaku bahwa Bahrain membantu mengorganisasi penggulingan pemerintah yang sah dibantu oleh Arab Saudi. Emir kala itu tak membangun jaringan pipa yang mengintegrasikan Qatar ke pasar negara tetangganya di kawasan teluk Arab (https://www.liputan6.com/global/read/2982767/akar-permu suhan-arab-saudi-dan-qatar-ada-sejak-22-tahun-lalu diakses pada 15 Mei 2018).

Krisis diplomatik besar antara Arab Saudi dan Qatar mencuat pada tahun 2014, tetapi diselesaikan setelah konsesi Qatar melalui embargo yang di lakukan oleh Arab Saudi sebagai kesepakatan damai dari sengketa itu. Sedangkan pemicunya adalah pidato oleh emir Qatar yang memuji Iran sebagai "kekuatan penting di wilayah Timur Tengah". Pada tingkat yang lebih dalam, embargo berawal pada tuduhan bahwa Qatar telah mengingkari janjinya pada 2014 untuk menyelaraskan kebijakan luar negerinya lebih dekat dengan kepentingan Arab Saudi. Pada tanggal 5 Juni, tanpa mengeluarkan ultimatum, Arab Saudi menutup perbatasan daratnya dengan Qatar dan tidak memberikan izin pada wilayah udara dan perairan territorial yang berasal dari Qatar. Bahrain juga bergabung dengan embargo terhadap Qatar. Dampak dari embargo tersebut membuat Qatar harus bergantung pada koridor udara dan laut Iran yang mempunyai wilayah cukup sempit. Tuntutan konkret tidak dikomunikasikan sampai delapan belas hari setelah embargo dimulai. Setelah embargo tersebut dikeluarkan Qatar

mulai mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran, selain itu juga menyatakan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris dan menutup Al Jazeera (Sailer, 2017 : 2).

Pada tahun 2017, secara tiba-tiba Arab Saudi dan negara teluk beserta Mesir kembali menilai bahwa Qatar telah mengabaikan sejumlah isu regional utama dari konflik di Yaman, krisis Suriah, ke Iran dan perang melawan terorisme. Arab Saudi mengatakan mengambil keputusan itu karena "adanya hubungan keterlibatan antara berbagai kelompok teroris dengan Pemerintah Qatar yang ditujukan untuk mendestabilisasi kawasan", termasuk Ikhwanul Muslimin, Al-Qaida, ISIS dan kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran. Negara-negara itu mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan semua lalu lintas darat, udara dan laut dengan Qatar, mengusir para diplomatnya dan memerintahkan warga Qatar untuk meninggalkan negara-negara Teluk dalam waktu empat belas hari. Arab Saudi juga menutup perbatasan daratnya dengan Qatar. Arab Saudi dan Yordania juga telah mencabut lisensi jaringan media Al Jazeera. Bersamaan dengan itu, Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk pasukan Qatar akan ditarik dari perang yang sedang berlangsung di Yaman. UAE memperingatkan bahwa setiap simpatisan dengan Qatar akan dipenjara (*Institute of Strategic Studies*, 2017 : 2).

Arab Saudi dan beberapa negara teluk yang memutuskan hubungan dengan Qatar juga memandang bahwa Qatar dalam kasus Suriah mendukung kelompok perlawanan yang hendak menggulingkan Assad. Tuduhan juga hadir bagi Qatar yang yang disebut ikut mendanai kelompok afiliasi Al Qaeda Tahrir Al Sham dalam pembiayaan pembebasan sandera. Juga dalam masalah Libya, Mesir dan UEA mendukung keberadaan Khalifa Haftar sedangkan Qatar dan Turki berikan dukungan terhadap kelompok perlawanan Libya. Arab Saudi dan UEA konsen juga terhadap masalah hubungan dekat Qatar dan Iran. Hubungan ini terlihat dalam isu ladang gas utara yang merupakan kerjasama Qatar dan Iran. Hubungan dekat ini sebelumnya terjalin dengan Hizbullah dalam kasus pembebasan sejumlah sandera

Qatar di Irak Selatan tahun 2016. Hal ini bertentangan dengan posisi Saudi yang menuduh Tehran bermain dalam kisruh internal di Suriah, Irak, Libanon, serta kawasan Teluk di Arab Saudi, Yaman dan Bahrain (*https://english.alarabiya.net/en/News/2017/06/05/MainreasonswhySaudiUAE-Bahrain-and-Egypt-severed-ties-with-Qatar.html*diakses pada 28 Januari 2018).

Propaganda media juga ikut andil dalam proses pemutusan hubungan ini, sebelumnya banyak media yang melansir bahwa Qatar mendanai beberapa kelompok terroris bahkan ada satu media yang membongkar bahwa ada transaksi warga Qatar yang mensupport kelompok Islam Radikal yang ada di Suriah. Sedangkan Qatar menolak mentah-mentah tuduhan tersebut, Qatar menjawab dengan memberikan pernyataan bahwa berita yang dimuat di media itu tidak benar sama sekali dan ntidak berdasar. Propaganda ini juga ikut memanaskan hubungan anatara kedua negara ini dan memuncak dengan langkah Saudi yang memutuskan Hubungan dengan Qatar (*https://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_diplomatik_Qatar_2017* diakses pada 3 Maret 2018).

Iran yang disebut-sebut terlibat dalam permasalahan ini memberikan sebuah pernyataan melalui Wakil Kepala Staf Kepresidenan Hamid Abouyebi yang menyebutkan bahwa Amerika di balik ini semua, Abouyebi menyebut bahwa ini adalah hasil awal dari tari pedang yang dilakukan oleh Raja Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud dan Donald Trump pada saat kunjungan Trump ke Arab Saudi.

Pasca pemutusan hubungan diplomatik antara Saudi dan Qatar Saudi mulai menutup perbatasan diikuti dengan negara-negara teluk yang juga ikut menutup perbatasan mereka dengan negara tersebut. Sementara Mesir menutup wilayah udara dan pelabuhan untuk semua bentuk angkutan Qatar. Para diplomat Qatar diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan Arab Saudi serta Warga Negara Qatar yang berada di Arab Saudi diberi waktu 14 hari untuk meninggalkan Arab Saudi. Langkah ini juga diikuti oleh negara-megara teluk yang ikut

memutuskan hubungan dengan Qatar. Selain itu Arab Saudi juga tidak mengijinkan adanya penerbangan dari atau menuju dan transit di Qatar. Langkah ini sangat berdampak bagi perekonomian Qatar dimana Qatar ialah negara yang mempunyai perusahaan penerbangan tersibuk yaitu Qatar Airlines. Arab Saudi juga mulai memblokir media-media Qatar salah satunya kantor AL-Jazeera yang berada di Ryadh di tutup secara paksa setelah pemutusan hubungan Diplomatik dengan Qatar.

Hingga saat ini beberapa negara mencoba menjadi mediator bagi Qatar dan Arab Saudi dalam menyelesaikan ketegangan ini, namun hingga saat ini belum ada negara yang berhasil meredakan ketegangan kedua negara ini, Qatar melalui menteri Luar negerinya menyatakan bahwa negaranya membuka selebar-lebarnya pintu mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena menurutnya pemutusan hubungan yang dilakukan Arab Saudi dan negara-negara teluk tidak berdasar dan tidak bisa di benarkan. Qatar mengetahui dengan serius bahwa pemutusan hubungan ini sangat berdampak buruk bagi negaranya terutama di bidang ekonomi, dimana tidak lama setelah pemutusan hubungan diplomasi ini harga saham perusahaan-perusahaan Qatar langsung menurun sebesar 7%.*(https://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/06/073000726/bursa.saham.qatar.anjlok.pasca-pemutusan.hubungan.diplomatik.6.negara diakses pada 10 April 2018).*

Namun Arab Saudi nampaknya tidak begitu mudah untuk diajak berkerjasama, sedangkan mediasi yang beberapa kali dilakukan melalui perwakilan masing-masing negara juga sampai saat ini masih belum bisa berhasil.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji hubungan Arab Saudi dan Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik kedua negara ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan. Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh peneliti adalah pertama Skripsi yang ditulis oleh Ridha Amalia dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul skripsi “Pemutusan Hubungan

Diplomatik Arab Saudi Terhadap Iran 2016" dalam hal ini Ridha Amalia membahas mengenai apakah saja factor yang melandasi terjadinya pemutusan hubungan diplomatik antara Saudi Arabia dan Iran. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ridha Amalia adalah sama-sama membahas mengenai konflik yang terjadi di Arab Saudi yang berujung dengan pemutusan hubungan diplomatik dua Negara, sedangkan perbedaannya adalah penelitian milik Ridha Amalia adalah penelitian ini lebih meninjau dari apasajakah faktor yang melatar belakangi sehingga terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Saudi Arabia dan Iran.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Aryo Bimo Prasetyo, Kholis Roisah, Peni Susetyorini dari Universitas Diponegoro tahun 2016 yang berjudul "Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi Arabia Terhadap Iran Pasca Eksekusi Hukuman Mati Syeikh Nimr Al-Nimr" di dalam jurnal ini para penulis mengemukakan implikasi apa saja yang menjadi landasan pengambilan keputusan Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran serta langkah apa saja yang dilakukan kedua Negara pasca terjadinya pemutusan hubungan diplomatik. Persamaan dari artikel yang dibuat oleh Aryo Bimo Prasetyo, Kholis Roisah, dan Peni Susetyorini dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai apa saja langkah-langkah yang dilakukan Arab Saudi dalam pemutusan hubungan diplomatik serta dampak apa saja yang dirasakan oleh kedua Negara, perbedaannya adalah artikel tersebut lebih menekankan pembahasan dari pandangan hukum internasional sebagai acuan Arab Saudi untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Adwani dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2015 yang berjudul "Akibat Pemutusan Hubungan Diplomatik Terhadap Perjanjian Multilateral Para Pihak" dalam artikel tersebut Adwani meneliti tentang dampak dari pemutusan hubungan diplomatik antara para pihak yang terkait secara global atau tidak ditujukan kepada satu Negara. Persamaan dari penelitian ini dan artikel yang ditulis oleh

Adwani ialah sama-sama meneliti mengenai dampak dari pemutusan hubungan diplomatik, perbedaannya ialah dimana Adwani dalam jurnalnya meneliti dampak secara dari pemutusan hubungan diplomatik terhadap perjanjian multilateral para pihak yang terkait Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan dampak dari pemutusan hubungan diplomatik yang secara khusus dalam kasus ini terjadi antara Arab Saudi dan Qatar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Hubungan Arab Saudi dan Qatar Pasca Pemutusan Hubungan Diplomatik Tahun 2017"**.

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Studi Keamanan Internasional, dalam mata kuliah ini mempelajari konsep keamanan suatu negara yang menjadi faktor penting dalam kehidupan bernegara suatu bangsa. Berdasarkan mata kuliah ini peneliti menilai adanya dukungan dari Qatar untuk organisasi-organisasi teroris memberikan dampak destabilisasi di kawasan Timur Tengah.
2. Hubungan Internasional di Timur Tengah, dalam mata kuliah ini mempelajari interaksi yang dilakukan antar negara-negara di kawasan Timur Tengah. Qatar dan Arab Saudi merupakan salah satu negara yang sering melakukan interaksi dengan negara-negara lain di kawasan Timur Tengah.
3. Hukum Internasional, dimana hubungan diplomatik dan konsuler menjadi salah satu kajian didalam mata kuliah hukum internasional. Pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi kepada Qatar ini telah diatur didalam hukum internasional.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Dari uraian latar belakang yang telah di paparkan. Maka dengan ini, dapatlah peneliti tarik perumusan masalah mayor dari fenomena diatas sebagai berikut: “Bagaimana hubungan Arab Saudi dan Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik di tahun 2017 ?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Dan dalam rumusan masalah mayor dia atas, maka peneliti menjabarkan kemabali rumusan masalah mayor kedalam beberapa rumusan masalah minor, beberapa masalah tersebut sebagai berikut :

1. Apa alasan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar?
2. Bagaimana respon Qatar terhadap keputusan Arab Saudi yang memutuskan hubungan diplomatik ?
3. Bagaimanakah peluang rekonsiliasi hubungan kedua negara ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diajukan oleh peneliti agar mempersempit fokus terhadap masalah. Dari permasalah yang ada, peneliti membatasi masalah yang dibahas dengan berfokus kepada apa sajakah permasalahan yang timbul terhadap hubungan kedua negara pasca pemutusan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Qatar. Adapun periode yang akan diteliti ialah mulai dari awal tahun 2017 dimana pada tahun ini hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar berada pada titik terendah sehingga terjadi

pemutusan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar di tahun 2017, sampai dengan tahun 2018 dimana penelitian berlangsung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka maksud dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar di tahun 2017 terhadap hubungan kedua negara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.
2. Untuk mengetahui bagaimana respon Qatar terhadap langkah Arab Saudi yang memutuskan hubungan diplomatik kepada Qatar.
3. Untuk mengetahui perkembangan hubungan Arab Saudi dan Qatar pasca pemutusan hubungan diplomatik.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka serta dapat memberikan sedikit sumbangan bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai Hubungan Internasional di kawasan Timur Tengah dan Studi Keamanan internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional dan Studi Kawasan Timur Tengah.
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan Studi Kawasan Timur Tengah.